

**EVALUASI PELAKSANAAN RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI
(SKM) PADA SMA NEGERI 1 TEJAKULA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

**OLEH
PUTU SARJANA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memperoleh (1) gambaran dan deskripsi tentang kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari latar, (2) gambaran atau deskripsi tentang kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari masukan, (3) gambaran dan dekripsi tentang kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari proses, dan (4) gambaran atau diskripsi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian evaluatif dengan mengadopsi model evaluasi **CIPP** (latar, masukan, proses, dan produk/hasil). Variabel latar diukur dengan instrumen berupa kuesioner latar, variabel masukan diukur dengan instrumen berupa kuesioner masukan, dan variabel proses diukur dengan instrument berupa kuesioner proses. Sampel penelitian berjumlah 51 guru, 1 kepala sekolah, 9 pegawai tata usaha, 10 komite sekolah, dan 46 siswa pada SMA Negeri 1 Tejakula yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*.

Untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan RSKM, data yang berupa skor variabel latar, skor varibael masukan, dan skor varibael proses selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kreterium ideal teoretik serta dengan menstransformasikan skor-Z ke dalam rumus skor-T. Setelah diinterpretasikan dalam kreteria kesiapan *kuadran glickman*, kesiapan SMA Negeri 1 Tejakula termasuk dalam *kuadran glickman* sangat siap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Tejakula sangat siap menjadi rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) ditinjau dari segi latar, masukan, dan proses.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan SMA Negeri 1 Tejakula sebagai rintisan sekolah kategori mandiri adalah bahwa pengembangan sekolah yang telah ada menjadi Rintisan SKM perlu dimaksimalkan lagi dengan beragam strategi, terutama sekali kesiapan pada aspek masukan dan aspek proses.

Kata kunci: evaluasi, rintisan sekolah kategori mandiri, latar, masukan, dan proses

An Evaluation on Conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakula The academic year 2009/2010

Abstract

This study aimed at finding out (1) description of conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakula from context point of view, (2) description of conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakul from input point of view, (3) description of conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakul from Process point of view, (4) description of obstacles encountered in conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakula.

This study belonged to an evaluative research that adopted the CIPP evaluation model. The context variable was measure by an instrument in the from of context variable questionnaire, the input variable by an instrument in the from of of input variable questionnaire, and the Process variable by Process variable questionnaire. The sample consisted of 51 teachers, 1 headmaster, 6 administration officers, 10 school committees, and 46 students in SMA Negeri 1 Tejakula derived purposive sampling technique.

The finding out in conducting School Preparation of Independence, data in the from of score related to the context, input and process variables were analyzed by using theoretic ideal criterion and with converting them into **t-scores**.

Having been interpreted into **Glickman's Quadrant** readiness level criteria, It found that readiness level of SMA Negeri 1 Tejakula l to be School Preparation of Independence was in very ready quandrant. Thus, it could be conclude that SMA Negeri 1 Tejakula was very ready to be School Preparation of Independence from the context, input and process points of view. The main obstacle encountered in preparing of SMA Negeri 1 Tejakula to be School Preparation of Independence is that the existed school development system to be School Preparation of Independence has not maximized by implementation of various strategies as inputs and Process strategies yet.

Key words: Evaluation , School Preparation of Independence, context, input and process.

1. PENDAHULUAN

Berbagai usaha dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) dan mutu pendidikan (formal, nonformal serta informal) adalah merupakan usaha yang paling dominan dilakukan. Pendidikan formal menempati posisi yang sangat strategis untuk hal tersebut, karena sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal menjadi kemampuan untuk hidup di masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Setiap peserta didik memiliki potensi dan sekolah harus mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, sekolah merancang pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik

agar memiliki kemampuan yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian, potensi peserta didik akan berkembang secara optimal.

Pada dasarnya peningkatan kualitas pendidikan berbasis pada sekolah. Sekolah merupakan basis peningkatan kualitas karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah berfungsi sebagai unit yang mengembangkan kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), strategi pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan demikian manajemen sekolah merupakan basis peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk memberdayakan potensi yang ada di sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia berilmu, cakap, dan kreatif, tetapi juga sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa standar nasional pendidikan meliputi (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. (Depdiknas, 2008)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 ayat 3 menjelaskan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar

minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan Sistem kredit semester (SKS) ditetapkan oleh peraturan menteri berdasarkan usul Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada ayat ini dijelaskan bahwa sekolah, khususnya SMA/MA/ SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri. Pengategorian ini didasarkan pada tingkat terpenuhinya standar nasional pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah dan pemerintah daerah berupaya agar sekolah/madrasah yang berada dalam kategori standar meningkat menjadi sekolah/madrasah kategori mandiri.

Landasan pelaksanaan rintisan SKM adalah kebijakan SKM yang ditetapkan oleh BSNP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Ditjen PMPTK, Renstra Depdiknas, kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, dan usulan penetapan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sambil menunggu diterbitkannya kebijakan SKM dari BSNP, untuk sementara Direktorat Pembinaan SMA berinisiatif mengembangkan kriteria untuk menetapkan SKM dalam rangka pelaksanaan program rintisan SKM dalam lima level. Pelevelan tersebut didasarkan pada tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan baik oleh pusat maupun daerah, dan penyusunan program kerja oleh sekolah. Pelevelan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) SMA kategori standar I = $x \leq 30,00\%$
- 2) SMA kategori standar II = $30,00\% < x \leq 50,00\%$
- 3) SMA kategori standar III = $50,00\% < x \leq 75,00\%$
- 4) SMA kategori mandiri I = $75,00\% < x \leq 100,00\%$
(hampir memenuhi standar nasional pendidikan)
- 5) SMA kategori mandiri II $\geq 100,00\%$
(memenuhi/melampaui standar nasional pendidikan)
 x = standar nasional pendidikan (8 standar)

Secara terus menerus kriteria tersebut akan disempurnakan sejalan dengan perkembangan penyelesaian penyusunan delapan standar nasional pendidikan secara lengkap.

Sebagai acuan pengembangan RSKM, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat

Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mengeluarkan pedoman dan perangkat rintisan SKM/SSN (sekolah kategori mandiri/ sekolah standar nasional) tahun 2008.

Sampai saat ini belum ada penelitian yang bersifat ilmiah untuk melihat tingkat kesiapan menjadi rintisan sekolah kategori mandiri/RSKM di SMA Negeri 1 Tejakula. Untuk itu perlu dilakukan studi evaluasi program untuk mengetahui kesiapan program rintisan sekolah kategori mandiri di SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari segi *context*, *input* dan *process* (yang didalamnya termasuk pemenuhan terhadap delapan standar nasional pendidikan) serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah (1) seberapaakah tingkat kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari segi latar? (2) Seberapaakah tingkat kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula dari segi masukan? (3) Seberapaakah tingkat kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula dari segi proses? (4) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula? (5) Apakah alternatif pemecahan masalah yang bisa digunakan dalam upaya peningkatan kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula? Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (a) menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) dalam meningkatkan mutu lulusannya melalui pemenuhan delapan Standar nasional pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. (b) memberikan gambaran kepada pelanggan internal, yaitu para guru dan staf pegawai administrasi, serta pelanggan eksternal yang meliputi siswa, orang tua siswa, dan masyarakat mengenai pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan yang tercermin dari mutu kegiatan proses pembelajaran di sekolah dengan didukung oleh suasana lingkungan sekolah serta mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (SDM) yang bermutu/memadai, sampai pada peningkatan mutu lulusan dan dapat melanjutkan pada jenjang

pendidikan yang lebih tinggi (jenjang perguruan tinggi/akademi), (c) Dapat dijadikan bahan evaluasi diri oleh sekolah-sekolah lain yang akan melaksanakan program yang sama pada hari-hari mendatang (d) Dapat dijadikan pedoman dan sampel empiris bagi peneliti lain yang ingin melaksanakan studi evaluasi terhadap program yang sejenis pada kemudian hari di tempat yang sama ataupun di tempat yang lain.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula dengan menggunakan pendekatan *mix method* yang merupakan bauran antara metode kuantitatif dan kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode evaluatif, yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap program atau konsep yang berorientasi pada sasaran, yakni suatu gambaran yang menunjukkan kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula.

Adapun subjek penelitiannya adalah semua guru dan pegawai administrasi di SMA Negeri 1 Tejakula yang menduduki jabatan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, pembina osis, siswa, ketua komite dan pengurusnya serta guru yang bertugas sebagai penanggung jawab program (PJP) dalam program kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) yang semuanya berjumlah 112 orang. Sampel penelitian ini adalah di Sekolah SMA Negeri 1 Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Husaini Usman (2000:137) dan Sugiyono (2007:124), teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Menurut Kerlinger (2002:135), sampling bertujuan tergolong sampling nonprobalitas yang mempunyai ciri penilaian dan upaya cermat untuk memperoleh sampel yang representatif dengan cara meliputi wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok yang diduga sebagai anggota sampel.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner/angket, pedoman wawancara, dan lembar observasi, serta studi

dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, serta dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan.

Menghitung rata-rata skor yang diperoleh pada tiap komponen dan mengonversikannya dengan kategori/klasifikasi pada skala lima yang dibuat berdasarkan *mean ideal dan standar deviasi ideal*. Untuk menentukan tingkat kesiapan pelaksanaan Rintisan SKM baik dari variabel latar, masukan, dan proses, digunakan kriteria ideal teoritik (Koyan,2007:73), sehingga diperoleh kategori sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi/Predikat dengan rujukan Kurva Normal

Rentang Skor	Klasifikasi/ Predikat
Mi + 1,5SDi → Mi + 3,0 SDi	sangat siap
Mi + 0,5SDi → Mi + 1,5 SDi	siap
Mi - 0,5SDi → Mi + 0,5 SDi	cukup siap
Mi - 1,5SDi → Mi - 0,5 SDi	kurang siap
Mi - 3 SDi → Mi - 1,5 SDi	sangat kurang siap

Mi = rata-rata ideal = $\frac{1}{2}$ (skor maks ideal + skor min ideal).

SDi = standar deviasi ideal = $\frac{1}{6}$ (skor maks ideal - skor min ideal).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa temuan yang diperoleh dari Evaluasi kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (RSKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula. Temuan-temuan itu dideskripsikan, dianalisis, dan dibahas lebih lanjut agar diperoleh simpulan-simpulan. Secara umum, dari **segi latar**, tingkat kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah mandiri di SMAN 1 Tejakula termasuk dalam kategori sangat siap.

Sangat siapnya aspek landasan hukum/kebijakan pendidikan, akreditasi sekolah, visi/misi sekolah, tujuan dan sasaran /program sekolah karena pemerintah sangat serius menjalankan amanat pasal 11 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah /PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menyatakan bahwa pemerintah mengategorikan sekolah/madrasah yang telah atau memenuhi standar

nasional ke dalam kategori mandiri. Aspek kondisi geografis, sosial-ekonomi, permintaan dan dukungan masyarakat dan *stakeholder* termasuk kategori sangat siap, yaitu kondisi lahan yang luasnya 1,5 hektar dengan bidang datar dan asri dilatarbelakangi oleh pemandangan pegunungan dan kondisi masyarakat sekitar yang kondusif untuk mendukung program RSKM di sekolah ini. Aspek kultur dan regulasi sekolah dalam pelaksanaan program RSKM di SMAN 1 Tejakula termasuk kategori sangat siap, yaitu suasana budaya kebersamaan dan aturan tata tertib yang bisa difahami oleh semua warga sekolah, termasuk aturan penerimaan peserta didik baru serta tingkat kelulusan /out put siswa.

Secara umum, **variabel masukan** termasuk kategori sangat siap. Kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan yang termasuk kategori siap, sebagai implikasi langsung dari penunjukan langsung oleh pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan Kabupaten kepada sekolah yang telah ada menjadi sekolah rintisan sekolah kategori mandiri. Banyak tantangan yang dialami, mulai dari etos kerja, kultur yang sudah melekat, komitmen dan tingkat kompetensi pendidik serta kependidikan. Seluruh tenaga kependidikan belum memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan profil RSKM. Semua tenaga kependidikan mempunyai latar belakang pendidikan SMA dan yang sederajat, sehingga ketika dihadapkan dengan tuntutan ICT yang terintegrasi dalam manajemen sekolah sangat lambat untuk berkembang. Begitu pula dengan tenaga pendidik (guru). Sebagian besar pendidik berlatar belakang pendidikan S1 saja. Dengan alasan usia yang sudah tua, para guru enggan untuk mempelajari komputer dan bahasa inggris, sehingga usaha untuk memenuhi penjaminan mutu yang sesuai dengan profil RSKM dari aspek pendidik dan tenaga kependidikan sangat lambat.

Aspek sarana dan prasarana kategori sangat siap. Hal ini juga sebagai implikasi langsung dari penunjukan langsung menjadi RSKM, sehingga terjadi kebingungan dalam merenovasi sarana dan prasarana yang telah ada untuk dikembangkan menjadi sarana yang memenuhi penjaminan mutu RSKM. Sekolah telah berusaha untuk secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana agar sesuai dengan penjaminan mutu RSKM melalui kerja sama dengan instansi terkait dan *stakeholders*.

Komponen pembiayaan termasuk kategori sangat siap, karena penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam batasan pembiayaan mutu saja, serta pelaporan

dana sudah tertata dengan baik. Sumber pendanaan berasal dari komite sekolah, dana *Block grant* RSKM, dana bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Sampai saat ini dana bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi hanya dalam bentuk fisik dan terbatas. Sekolah sangat mengharapkan agar dana bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan khususnya, dalam peningkatan kualifikasi akademik, sehingga penjaminan mutu RSKM segera dapat dipenuhi.

Variabel proses secara umum termasuk kategori sangat siap. Aspek proses pembelajaran dalam pelaksanaan program RSKM di SMAN 1 Tejakula termasuk kategori sangat siap. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam komponen pembelajaran adalah kemampuan guru mengajar berbasis media ICT dan menggunakan berbagai model pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah telah membuat inovasi dengan mengadakan kerja sama dengan pengawas akademik dari pengawas yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

Sampai saat ini sekolah juga belum melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS). Keterlambatan pelaksanaan SKS disebabkan oleh belum jelasnya aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional untuk memfasilitasi siswa dan sekolah belum mampu melaksanakan *moving class*.

Aspek pengelolaan sekolah dalam pelaksanaan program RSKM di SMAN 1 Tejakula termasuk Kategori sangat siap Hal ini dapat dilihat dari visi, misi dan tujuan sekolah yang dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan *stakeholders* serta mendapat dukungan dari semua warga sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Sekolah memiliki rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) satu tahun dan rencana kegiatan sekolah /RKS jangka waktu empat tahun, memiliki pedoman penyelenggaraan RSKM, dan program pembiayaan operasional sekolah, serta termasuk pelaporan yang tertata baik.

Aspek penilaian pendidikan kategori sangat siap. Penilaian yang dilakukan sebagian besar para guru hanya dari aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotor sering tidak teramati, karena kurang cermatnya pengamatan yang diakibatkan oleh jumlah siswa dalam satu kelas berkisar 32 -- 40 orang. Secara bertahap, sekolah juga berusaha untuk mengurangi jumlah siswa dalam satu kelas serta selalu

mengefektifkan *team teaching*, sehingga lebih memudahkan para guru untuk melaksanakan penilaian.

Setelah skor pada semua variabel dirubah kedalam T- skor, dan dilanjutkan dengan menentukan arahnya, ternyata didapatkan bahwa untuk variabel latar, T- skor > 50, yang berarti arahnya positif. Variabel masukan T- skor > 50, yang berarti arahnya positif., sedangkan variabel proses T- skor > 50, yang berarti arahnya positif. Dengan demikian, tingkat kesiapan latar = +, kesiapan masukan = +, kesiapan proses = +, artinya, **secara umum tingkat kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMAN 1 Tejakula adalah sangat siap.**

Dari hasil wawancara mendalam yang diadakan terhadap empat kepentingan yang berbeda, yaitu siswa, komite sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terungkap beberapa kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program rintisan sekolah kategori mandiri di SMA N 1 Tejakula. Adapun kendala-kendala itu antara lain sebagai berikut. (1) Bahasa Inggris merupakan kendala yang dialami semua komponen, baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun siswa. Sarana penunjang seperti lab. bahasa, komputer, lab fisika sampai saat ini tidak ada, sehingga pemenuhan terhadap standar sarana prasarana menjadi terhambat. (2) Sebagian besar guru-guru merasa kekurangan waktu dalam menerapkan pembelajaran remidi dan pengayaan, apalagi bagi guru-guru yang telah tersertifikasi diwajibkan memiliki beban kerja sebanyak 24 jam tatap muka per minggu. Para guru tidak punya lagi waktu untuk melaksanakan kegiatan ke-MGMP-an. Guru tidak punya cukup waktu untuk berdiskusi di dalam kegiatan MGMP ataupun lintas MGMP untuk membahas perkembangan kemajuan akademis siswa. Demikian juga dengan perencanaan strategi pembelajaran dan penggunaan proses pembelajaran berbasis ICT/multi media. (3) ICT merupakan masalah yang sangat besar dihadapi oleh sebagian besar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan mengalami kesulitan dalam menerapkan ICT untuk manajemen sekolah. Sebagian besar manajemen administrasi sekolah dikerjakan masih bersifat manual. Sehingga tidak bisa diakses dengan cepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagian besar guru MIPA telah menguasai ICT meskipun baru dalam tataran penggunaan *power point* dan multi media pembelajaran yang sudah jadi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pihak sekolah belum secara rutin/berkala

melaksanakan pelatihan komputer dan internet untuk pendidik dan tenaga kependidikan. (4) Kultur sekolah, situasi, dan kondisi di lingkungan sekitar sekolah serta masyarakat sekitar belum begitu besar menaruh perhatian atas kemampuan dan sikap/perilaku belajar siswa yang dapat mengarah /berorientasi kepada pendidikan yang bermutu.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (RSKM) pada SMA Negeri 1 Tejakula berdasarkan analisis model CIPP termasuk kategori sangat siap, baik dari segi latar, masukan, maupun dari segi proses.

Untuk memantapkan dan meningkatkan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri (RSKM) pada SMA negeri 1 Tejakula dan berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan baik dari segi latar, segi masukan maupun dari segi proses, dapat di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Rekomendasi kebijakan untuk komponen latar.

1) Untuk pihak Sekolah

- (a) Sekolah hendaknya secara terus-menerus menyosialisasikan visi, misi, dan tujuan/program sekolah sehingga membunih dengan seluruh warga sekolah, serta semua berusaha untuk mencapainya.
- (b) Sekolah perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sekitar dan *stakeholders*, tidak hanya dalam hal pendanaa/finansial, tetapi juga dalam sumbangan pemikiran/ide-ide yang kreatif dan inovatif.

2) Untuk pihak Pemerintah

- (a) Pemerintah hendaknya menyiapkan anggaran yang memadai bagi sekolah RSKM untuk dipersiapkan menjadi sekolah kategori mandiri, tidak hanya dalam pembiayaan MUTU tetapi juga dalam pembiayaan bidang fisik, seperti pengadaan laboratorium beserta fasilitas pendukungnya.

Rekomendasi kebijakan untuk komponen masukan

1) Untuk pihak Sekolah

- (a) Kepala Sekolah secara bersama-sama dengan pengurus komite sekolah secara rutin mengajukan proposal bantuan dalam bentuk *block-grant* kepada pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, baik bantuan sarana prasarana ICT maupun bantuan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kerja (diklat) teknis.
- (b) Sekolah hendaknya selalu mempersiapkan anak didiknya untuk bisa mencapai kelulusan di atas 90% melalui pemberian jam tambahan belajar dengan program pengayaan dan remidi secara berkesinambungan.
- (c) Sekolah hendaknya secara berkelanjutan berusaha untuk meningkatkan profesionalisme guru, terutama dalam penguasaan komputer, bahasa Inggris dan berbagai model pembelajaran. Sekolah hendaknya membuat pelatihan dalam pembelajaran yang berbasis ICT. Sekolah juga secara berkesinambungan meningkatkan keterampilan tenaga kependidikan dalam penguasaan ICT dalam menjalankan manajemen administrasi sekolah sehingga dapat memenuhi target yang sesuai dengan profil RSKM.

2) Untuk pihak Pemerintah

- (a) Pemerintah daerah dalam hal ini SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng agar meninjau / mereview kembali tentang beban kerja guru bagi guru (tenaga pendidik) yang telah tersertifikasi, sehingga para guru dapat dengan leluasa melaksanakan tugas secara proporsional dan profesional.
- (b) Pemerintah hendaknya menyediakan bantuan biaya untuk pengembangan sekolah RSKM sesuai dengan kewenangannya, dan mengurangi isu pendidikan gratis selama keuangan negara belum mencukupi untuk membiayai pendidikan.

3) Untuk pihak LPTK

- (a) LPTK hendaknya segera membuka kelas Magister Sains (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi) bertaraf Internasional untuk menyiapkan guru yang

mampu mengajar berbasis bahasa Inggris dan berbasis ICT serta mampu menggunakan berbagai model pembelajaran yang inovatif.

- (b) PPL yang ditempatkan pada sekolah RSKM hendaknya yang mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris, mampu menggunakan ICT dan menguasai berbagai model-model pembelajaran.

Rekomendasi kebijakan untuk komponen proses

1) Untuk pihak Sekolah :

- (a) Kepala Sekolah secara bersama-sama dengan pengurus komite sekolah secara rutin mengajukan proposal bantuan dalam bentuk *block-grant* kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, baik itu bantuan sarana penunjang seperti lab. bahasa, lab. komputer, lab fisika maupun bantuan dalam bentuk Bimbingan Teknis.
- (b) Sekolah hendaknya memiliki rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) satu tahun dan rencana kegiatan jangka menengah (RKJM) jangka waktu empat tahun berdasarkan pedoman penyelenggaraan RSKM dan program pembiayaan oprasional sekolah serta termasuk pelaporan yang berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan *stakeholders* serta mendapat dukungan dari semua warga sekolah dan komite sekolah.

2) Untuk pihak Pemerintah

- (a) Pemerintah daerah, dalam hal ini SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, hendaknya secara berkala melengkapi kebutuhan sekolah, terutama pada sarana dan prasarana yang mendukung target tercapainya profil RSKM.
- (b) Pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat hendaknya melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan kewenangan operasional dalam pengembangan sekolah RSKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmini. 2004, *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2001, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi). Jakarta : Bumi Aksara.
- Atmadi, A. dan Y. Setyaningsih. 2000. *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius .
- Dantes, Nyoman. 2007. *Metodologi Penelitian*. Singaraja: FIP Undiksha
- Depdikbud. 1991. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas*. Dirjen Dikdasmen. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah.
- Depdiknas, 2008. *Perangkat Rintisan SKM/SSN*. Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Marhaeni, A.A.I.N. (2007), *Evaluasi Program Pendidikan*, Singaraja: PPs Undiksha
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*
- Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan*
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23*.
- Popham, W.J. 1985. *Educational Evaluation*. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
- Siskandar. 2003. "*Penyelenggaraan Sistem SKS di SMU*". Makalah Seminar Nasional Penerapan Sistem SKS pada SMU di Provinsi NTB tanggal 23 Pebruari 2003.
- Slameto. 1991. *Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stott, Lousie, Fink Dean. & Earl. Lorna. (2003). *It's about learning*. London: RoutledgeFarlmer.
- Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wildan. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Didaktika. Jurnal Pendidikan Dasar dan TK. 1 (1)-2002*.

Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta:Bayu Indra Grafika.